

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI RIAU (STUDI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

Wan Masyitah^{1*)}, Tisra Aulia²⁾, Meta Yolanda³⁾

^{1,2,3}Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

*Email: wanmasyitah77@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu hal yang merubah kehidupan manusia. namun tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan Karen abeberapa faktor. Akan tetapi pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun agar pendidikan diIndonesia bisa merata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kepulauan meranti dan hambatannya. Adapun metode penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaanprogram wajib belajar 12 tahun di kabupaten meranti belum terealisasi dengan baik karan faktor ekonomi sosial dan sumberdaya.

Kata kunci :Pendidikan, pendidikan 12 tahun, hambatan

Abstract

Education is one of the things that change human life. but not everyone can get an education Karen aseveral factors. However, the government has issued a 12-year compulsory education program so that education in Indonesia can be evenly distributed. The purpose of this study is to determine the implementation of the 12-year compulsory education program in the Meranti Islands district and its obstacles. As for the research method of qualitative descriptive research. The results showed that the implementation of the 12-year compulsory education program in Meranti District has not been well realized due to economic, social and resource factors

Keywords : education, 12-year education, barriers

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga akan bermakna strategis karena dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Partisipasi masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk memajukan pendidikan sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menuntut pendidikan yang bermutu, tetapi juga berperan serta memberikan masukan

sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Terutama dalam aspek finansial, pihak sekolah bersama masyarakat diberikan kewenangan untuk menyusun pembiayaan serta diwajibkan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaannya guna untuk kepentingan pendidikan.

Pada era otonomi saat sekarang ini warga sekolah (guru dan kepala sekolah beserta staf karyawan sekolah) diberikan tanggung jawab yang besar dalam mengelola

pendidikan. Pada tataran praktik, disadari bahwa masalah pendidikan seperti yang dihadapi sekarang adalah masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah kurangnya biaya untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah, sulitnya melakukan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan global, banyak lulusan yang tidak mampu bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan, kurang lengkapnya sarana prasarana, dan banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah.

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No.20 Tahun 2003.

Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 ini Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Salah satu daerah yang telah melakukan program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu provinsi Riau Dimana payung hukum yang mendasari kebijakan ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada pasal 34 ayat 2 a yang berbunyi “ Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun” dan Pasal 34 Ayat 2b yang berbunyi “ Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah”

Masih masih tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau merupakan salah satu alasan yang membuat adanya pelaksanaan program ini. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mencatat angka anak putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas sederajat sebanyak 123.840 anak yang terbesar di 12 kabupaten/kota di Riau

Dilihat dari gambaran umum penduduk usia 16-18 tahun tidak atau belum bersekolah berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA sederajat sebanyak 368,9 orang dengan rincian secara persentase APK 10,23 persen atau 37,738 orang putus sekolah. Sedangkan APM berdasarkan persentase mencapai 33,57 persen atau 123.840 orang

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau yang bisa baru mekar tepatnya pada 19 Desember 2008. Sebagai Kabupaten Baru pendidikan Dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dihadapkan dengan sejumlah masalah krusial, seperti keterbatasan dan pemerataan guru, minimnya infrastruktur sekolah dan fasilitas pendidikan, hingga masih banyaknya anak yang tidak sekolah. Dari data statistik di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tahun 2011 – 2013 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan prasarana pendidikan dan berbanding terbalik dengan jumlah murid yang bertambah tiap tahunnya (Asrida & Rastra 2016).

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan perumusan masalah yakni bagaimana Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di kabupaten kepulauan meranti dan Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di kabupaten kepulauan meranti

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di kabupaten kepulauan meranti dan Untuk mengetahui Faktorfaktor

apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di kabupaten kepulauan meranti

Tinjauan pustaka dari penelitian ini :

a. Wajib Belajar

Pengertian wajib belajar dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tentang wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Pembiayaan pendidikan dalam wajib belajar 12 tahun bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi peran masyarakat juga dibutuhkan, kecuali masyarakat yang miskin. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Martono (2012) yang hasilnya, sekolah gratis dinilai dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, konsep sekolah gratis diberlakukan bagi masyarakat miskin bukan untuk semua siswa. Selain itu, sekolah gratis juga tidak sepenuhnya dapat meningkatkan mutu lulusan hal ini sesuai dengan hasil penelitian Supardi dan Leonard, (2012) yang hasilnya adalah kebijakan sekolah gratis tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

b. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Pendidikan yang bermutu dapat dihasilkan melalui transformasi sebuah sistem pendidikan yang didukung oleh komponen input yang bermutu pula. Salah satu komponen input tersebut adalah akses pendidikan atau lebih khususnya ketersediaan sarana prasarana, oleh karena itu manajemen sarana prasarana harus disiapkan secara matang. Secara umum tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan yang efektif dan efisien (Bafadal, 2004).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus disiapkan secara matang dan terencana dengan baik. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan disekolah meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan (Hermino, 2013).

c. Mutu Pendidikan

Mutu menjadi salah satu hal yang utama dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam program wajib belajar 12 tahun harus juga disiapkan peningkatan mutunya juga. Mutu adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh produk yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen (Gasperz, 1997). Selain itu mutu adalah untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Arcaro, 2007) Terdapat lima dimensi pokok yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan, yaitu: (1) Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepatwaktu, akurat dan memuaskan. (2) Daya tangkap (responsiveness), yaitu kemauan para tenaga kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. (3) Seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya, reputasi penyelenggaraan pendidikan yang positif di mata masyarakat, sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan profesionalisme dan kesopanan. (4) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara murid dan guru. (5) Bukti

langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga kependidikan dan sarana komunikasi (Hikmat, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena- fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya- gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu arti dan lain sebagainya.

Objek pada penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kepulauan meranti dan hambatan-hambatannya. Penelitian ini dilakukan di kabupaten kepulauan meranti. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini berikut:

1. Observasi dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian.
2. Wawancara, maksudnya Tanya jawab yang penulis lakukan secara langsung kepada responden yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan antara lain ketentuan dan kebijakan dalam kualitas pelayanan publik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) adalah proses mengumpulkan dan memastikan informasi pada variable of interest (subjek yang akan dilakukan uji coba) dengan cara yang sistematis yang memungkinkan seseorang dapat menjawab pertanyaan dari uji coba yang dilakukan. Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi
3. Menyajikan Data (*Data Display*) menyajikan data, mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian
4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verifying*) tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data, membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan investasi yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia di masa depan. Dengan pendidikan manusia bisa dilatih dalam ketrampilan maupun kecerdasan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin kompleks. Indikator yang penting dalam menilai sumber daya manusia adalah pendidikan, artinya semakin baik taraf pendidikan maka semakin baik pula sumber daya manusia tersebut. Dengan pendidikan orang yang bodoh atau tidak tahu bisa menjadi pintar, artinya dengan pendidikan terjadi proses transfer knowledge.

Oleh karena itu pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di kabupaten kepulauan meranti untuk Pendidikan merupakan investasi yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia di masa depan. Dengan pendidikan manusia bisa dilatih dalam ketrampilan maupun kecerdasan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin kompleks.

Indikator yang penting dalam menilai sumber daya manusia adalah pendidikan, artinya semakin baik taraf pendidikan maka semakin baik pula sumber daya manusia tersebut. Dengan pendidikan orang yang bodoh atau tidak tahu bisa menjadi pintar, artinya dengan pendidikan terjadi proses transfer knowledge. Oleh karena itu pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia.

A. Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di kabupaten kepulauan Meranti

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama yang harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melaksanakan aktivitas dinas sehubungan dengan akan pencapaian tujuan organisasi dinas adalah dengan membuat perencanaan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota pekanbaru sudah jelas dan terarah dengan adanya (Tupoksi) tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dinas yang ada di kantor dinas Pendidikan kabupaten kepulauan meranti Proses pengorganisasian adalah proses suatu pengelompokan, yakni disamping pengelompokan orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, juga akan diikuti sertakan pula dengan pengelompokan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Dinas pendidikan kabupaten kepulauan meranti sebagai pelaksana dalam menjalankan program wajib belajar ini terus berupaya dalam memberikan informasi terhadap pentingnya pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi asset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang di perlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing sesuai rencana semula. Program wajib belajar 12 tahun di kabupaten meranti dimendapatkan pengawasan dari dinas pendidikan provinsi Riau

B. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses implementasi yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses implementasi tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan implementasi dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Sebagai daerah yang dikelilingi laut keadaan sosial dan ekonomi di kabupaten Meranti di golongan rendah ini berdampak juga terhadap pendidikan anak-anak disana. Karna sebagian besar masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan yang penghasilan tidak menentu. Hal ini juga berakibat banyak nya anak-anak enggan melanjutkan sekolah karna faktor ekonomi karena harus membantu orang tuanya.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh sebab itu dalam implementasi suatu kebijakan diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas agar program tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan juga efisien. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini sumber daya manusia masih belum mencukupi yang mengakibatkan program wajib belajar tidak terlaksana dengan baik

Sarana yang kurang memadai juga menjadi alasan belum teralisasi program wajib belajar 12 tahun di kabupaten meranti ini dengan baik. ada beberapa daerah pun belum ada sekolah nya dan terpaksa sekolah didaerah lain yang menumpuh jalur laut dan tidak semua siswa sanggup melakukan hal itu.

KESIMPULAN

Program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kepulauan meranti belum teralisasi dengan baik hal ini dikarena kan faktor ekonomi sosial dan sumberdaya yang belum memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama puji syukur kamu ucapkan kepada Allah SWT, kepada Dinas pendidikan kabupaten kepulauan meranti, kepada rekan-rekanyang ikutaandil dalam penyelesaian penelitian ini, kepada penetei terdahulu yang telah kamu jadikan sebagai bahan acuan atau referensi dan terima kasi kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah mengadakan webinar nasional ini

REFERENSI

- Hikmah, N. U., & Julaiha, S. (Eds.). (2022). *Kualitas Layanan Perguruan Tinggi: Komponen dan Metode*. Syiah Kuala University Press.
- Merlion, MI, & SD, ZR (2017). *Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru* (Disertasi Doktor, Universitas Riau).
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2017). Kajian implementasi program wajib belajar 12 tahun di kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2).
- Wardani, W. K., Astuti, P., & Harsasto, P. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 371-388.